

KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dalam rangka melaksanakan amanat tersebut Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 yang merupakan informasi capaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan, baik keberhasilan maupun kendala dan solusi pemecahannya serta sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian setidaknya pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran atas pelaksanaan program kegiatan yang berupa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban atas kinerja dan peningkatannya dimasa yang akan datang.

Malang, Februari 2020

**KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN III
PROVINSI JAWA TIMUR DI MALANG**

(TTD)

Drs. SJAICHUL GHULAM, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620803 198702 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Isu Strategis.....	5
D. <i>Cascading</i> Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD).....	8
E. Peta Proses Bisnis.....	9
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	20
A.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 .. dengan Tahun Sebelumnya	56
A.3. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja..... Renstra Tahun 2014 - 2019	58
A.4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi	59
A.5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya..... (<i>cost per outcomes</i>)	61
A.6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja ..	65
B. Realisasi Anggaran	67
BAB IV : PENUTUP.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
- Form Pendanaan Indikatif pada Renstra	
- Perjanjian Kinerja	
- Rekapitulasi Data	
- <i>Cascading</i> Kinerja (keterhubungan dengan RPJMD 2019 - 2024)	
- Peta Proses Bisnis (berdasar RPJMD 2019 - 2024)	

BAB I

PENDAHULUAN

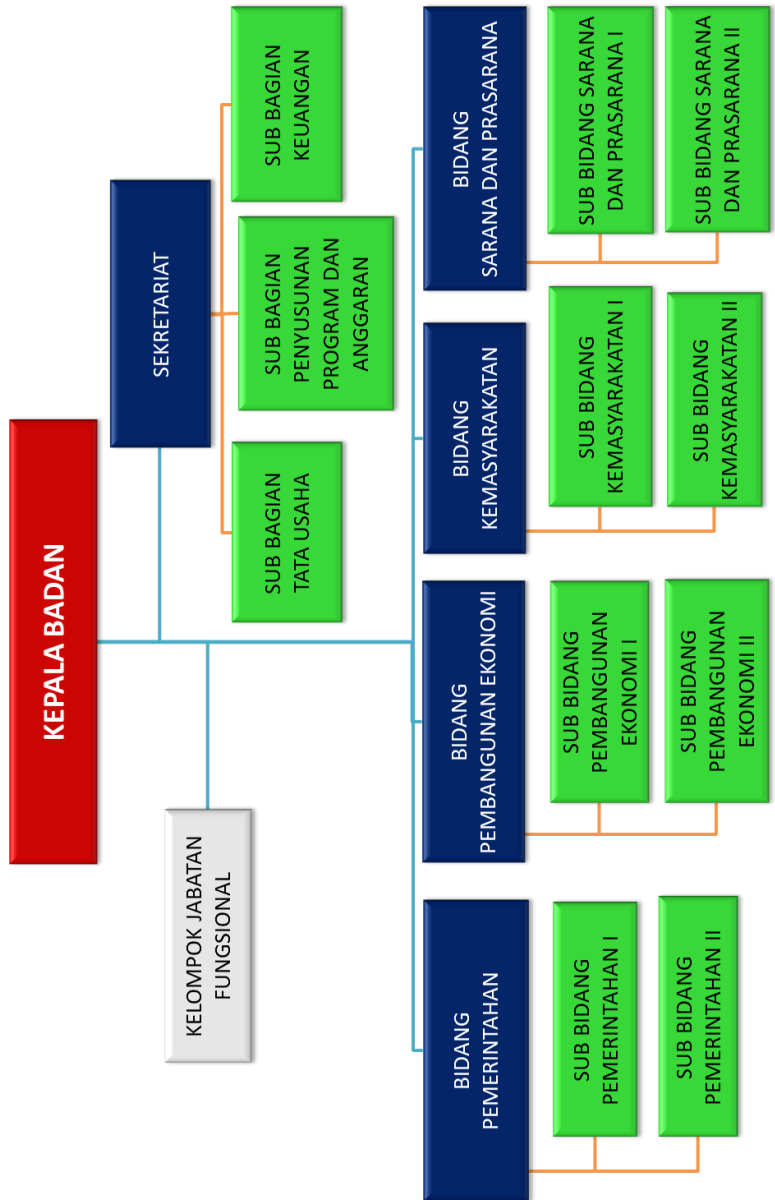
A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemerintahan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan I.
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan II.
- d. Bidang Pembangunan Ekonomi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I.
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II.
- e. Bidang Kemasyarakatan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kemasyarakatan I.
 - 2) Sub Bidang Kemasyarakatan II.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana I.
 - 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana II.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang dalam bentuk Bagan selengkapnya sebagaimana bagan berikut ini :

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BAKORWIL MALANG



B. Tugas dan Fungsi

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan disebut Bakorwil adalah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Bakorwil III yang berkedudukan di Kota Malang merupakan salah satu dari 5 (lima) lima Bakorwil yang ada di Jawa Timur.

Wilayah Kerja Bakorwil Malang meliputi 9 (sembilan) Kabupaten/Kota ; Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.

Sedangkan untuk penjabaran kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Bakorwil dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Bakorwil merupakan unsur yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kerjanya.

Dalam tugas melaksanakan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur, Bakorwil Malang telah mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya dan telah diimplementasikan kedalam program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayah kerja Bakorwil Malang. Keberadaan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur mempunyai potensi dan posisi yang strategis dimasing-masing wilayah untuk membantu tugas-tugas Gubernur yang belum atau tidak terjangkau oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka dalam rangka mendekatkan pelayanan dan percepatan pelayanan maka Bakorwil Jawa Timur sangat diperlukan.

Perlu kita ketahui bahwa luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang lebih 38.687.622 jiwa luas wilayah darat 47.157,71 KM2 luas laut 110.000 KM2, 229 pulau besar dan kecil serta sosial budaya yang beraneka ragam sehingga diperlukan *span of control* yang memadai. Dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat di Kabupaten/Kota sebagai wujud penyelenggaraan otonomi daerah. Peningkatan hasil koordinasi dan kerjasama menjadi kebutuhan pemerintah provinsi yang dalam hal ini pelaksanaan tugas-tugas koordinasi telah dilaksanakan oleh Bakorwil Jawa Timur.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana akan dilimpahkannya beberapa kewenangan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi menjadikan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur layak didukung oleh sumber daya sosial dan SDM yang memadai guna menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di daerah.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang antara lain :

- 1 Potensi konflik antar daerah dalam hal batas wilayah daerah.
- 2 Kewenangan organisasi terhadap pemerintah kabupaten/kota.
- 3 Sinergitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya sosial antara provinsi dan kabupaten/kota.
- 4 Perlunya lembaga yang berfungsi untuk mendorong, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

C. Isu Strategis

Berdasarkan gambaran umum dan kondisi daerah serta hasil konsultasi publik rencana strategis daerah, maka permasalahan dan isu-isu strategis di wilayah kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang dapat diuraikan menjadi 2 (dua) pokok isu strategis, yaitu Belum optimalnya pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Moitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang.

Sedangkan beberapa isu-isu strategis yang ada dan mungkin terjadi dalam periode Renstra dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bidang Pemerintahan

- Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu di daerah (di Kecamatan).
- Permasalahan batas wilayah daerah.
- Penyediaan Peraturan Daerah (Perbup/Perwali) tentang cagar budaya, museum dan sejenisnya.
- Kapasitas kelembagaan desa kurang memadai.
- Pola Penanganan bencana terpadu.
- Rendahnya kualitas pelayanan publik didaerah (IKM).
- Penataan lingkungan yang tertib dan aman.
- Data dan informasi pembangunan bidang pemerintahan.

2) Bidang Pembangunan Ekonomi

- Pembangunan ekonomi inklusif, mandiri berbais agrobisnis / agroindustri.
- Pengembangan kawasan strategis pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
- Pengembangan kawasan strategis industrialisasi.
- Belum optimalnya pengelolaan agropolitan dan kawasan strategis minapolitan.

- Belum optimalnya promosi produk-produk unggulan daerah.
- Pengembangan industri makanan dan minuman produk lokal
- Tingginya tingkat ketergantungan bahan pangan beras.
- Rendahnya daya saing koperasi dan UKM dalam hal penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar (kepemilikan sertifikat, standarisasi, jaminan mutu dan inovasi).
- Rendahnya kemampuan akses permodalan kepada sumber-sumber pembiayaan.
- Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke kosumen.
- Pengembangan Koperasi dan UKM termasuk Kopwan dan Koppontren.
- Data dan informasi pembangunan bidang ekonomi.

3) Bidang Kemasyarakatan

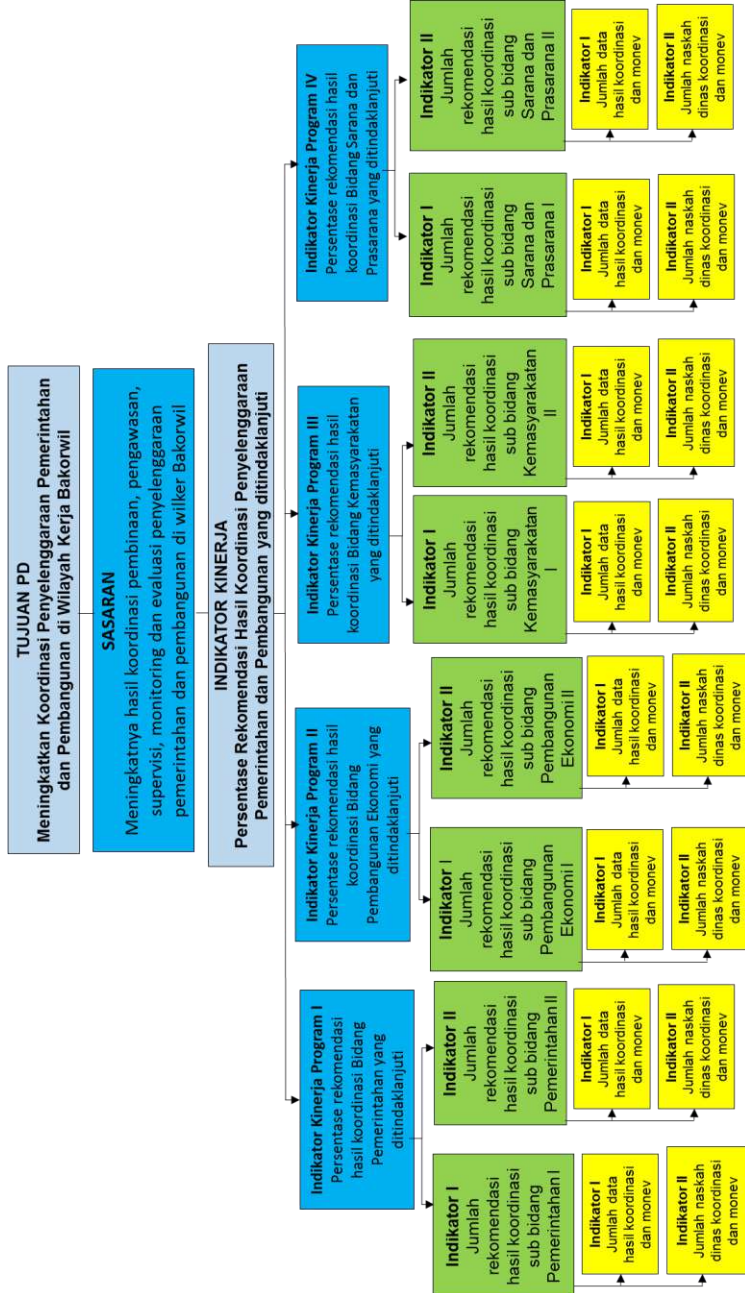
- Jumlah angka buta huruf masih tinggi.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan.
- Belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum.
- Banyaknya lembaga pendidikan yang belum terakreditasi sesuai peraturan yang berlaku.
- Biaya kesehatan masih belum terjangkau oleh masyarakat.
- Kualitas pelayanan kesehatan
- AKI, AKB dan Balita gizi buruk relative masih tinggi.
- Kurang tersedianya akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- Pemberdayaan perempuan di desa.
- Akses informasi dan penyediaan tenaga kerja yang belum optimal.
- Tingginya konflik ketenagakerjaan.
- Rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja.
- Pelayanan administrasi kependudukan belum optimal.
- Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia.

- Rendahnya komitmen lintas sektor dan masyarakat tentang tindak kekerasan dan perdgangan orang.
- Penanganan PMKS di daerah belum optimal terutama Narkoba dan WTS.
- Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS.
- Pengembangan seni budaya dan pariwisata.
- Menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.
- Harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama.
- Data dan informasi pembangunan bidang kemasyarakatan.

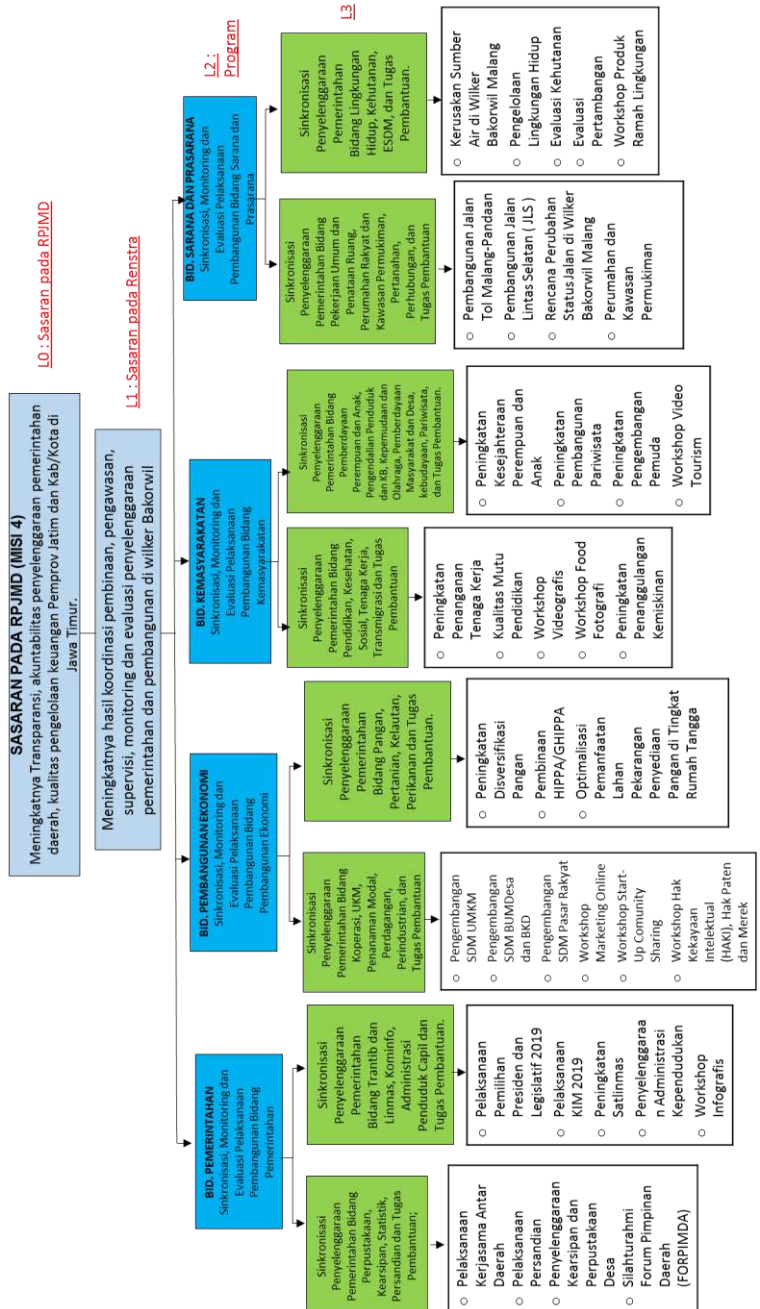
4) Bidang Sarana dan Prasarana

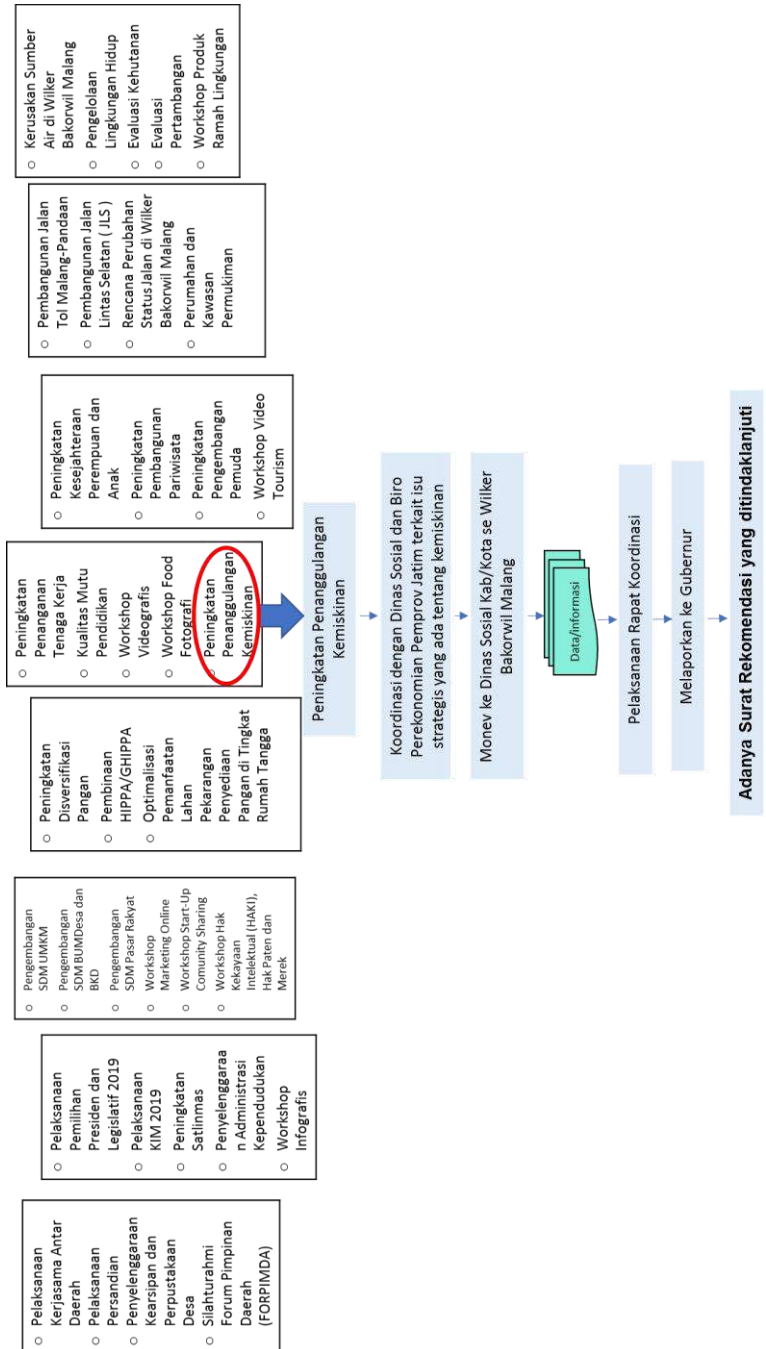
- Rencana jalan strategis nasional, jalan lintas selatan yang sampai saat ini belum tersambung.
- Belum tersedianya Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis daerah dan Kawasan Perkotaan sebagai instrument pengendalian pemanfaatan ruang.
- Pelestarian lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencegahan pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam.
- Penyediaan jaringan irigasi dan air bersih belum mencukupi.
- Meningkatnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai/DAS.
- Belum terpenuhinya luasan RTH sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Penertiban kendaraan berat dan tonase di jalan nasional, provinsi dan kabupaten.
- Disparitas pengembangan wilayah.
- Belum optimalnya perwujudan Nilai Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang.
- Belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pembangunan di daerah.
- Data dan informasi pembangunan bidang sarana dan prasarana.

D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

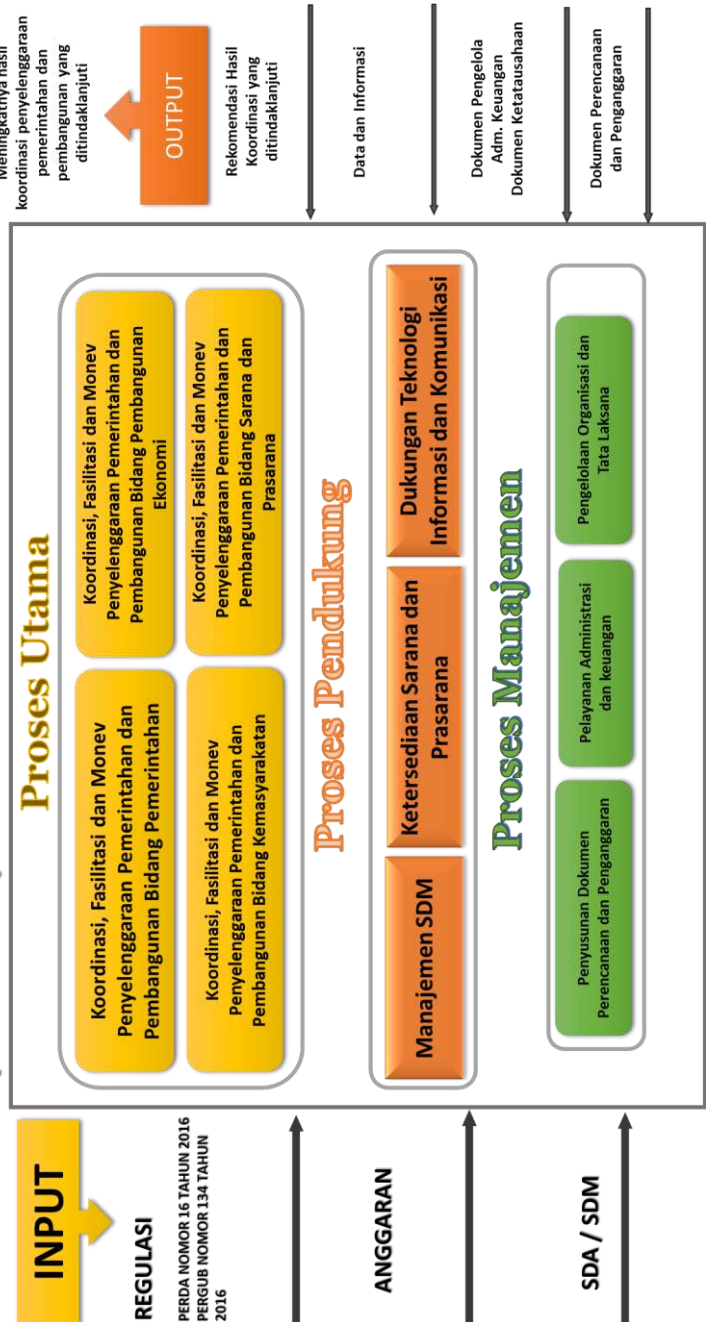


E. Peta Proses Bisnis





PROSES BISNIS (LANJUTAN....)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah proses awal dari penerapan manajemen kinerja dalam upaya mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil. Perencanaan kinerja yang baik akan menghasilkan pelaksanaan dan pengukuran serta pelaporan kinerja yang akuntabel.

Perencanaan Kinerja ini tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dimana Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Gubernur Jawa Timur) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Kepala Perangkat Daerah) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini berdasarkan pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) yang mengacu pada pada Dokumen Perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (RPJMD dan RKPD).

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang Tahun 2014-2019 memuat perencanaan strategis perangkat daerah, hubungan antar dokumen perencanaan, landasan hukum, gambaran pelayanan perangkat daerah, tantangan, peluang, isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program kegiatan, dan indikator kinerja berdasarkan tujuan sasaran dan kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Secara ringkas substansi RENSTRA Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang Tahun 2014 - 2019 sebagai berikut :

- **Tujuan :**

Tujuan yang hendak dicapai Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang adalah **“Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang”**.

- **Sasaran :**

Sasaran yang dimaksudkan adalah Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang Tahun 2014-2019 yaitu **“Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang”**, didukung oleh 5 (lima) program 9 (sembilan) kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran **“Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti”**.

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA DALAM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	95 %

Secara Detail Sasaran, Indikator Kinerja, Target, Program, Kegiatan dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang Tahun 2019 sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	95%	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan	521.710..000
			- Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan	254.087.000
			- Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan	267.623.000
			Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi	692.100.000
			- Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan	523.350.000
			- Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan	168.750.000
			Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan	949.973.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
			- Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan	412.850.000
			- Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan	537.123.000
			Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	477.413.000
			- Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan	175.098.000
			- Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan	302.315.000
			Program pengembangan Data Informasi	104.100.000
			- Kegiatan Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	104.100.000

Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang Tahun 2019 sebanyak 36 (tiga puluh enam) koordinasi yang meliputi :

- 1) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah;
- 2) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Persandian;
- 3) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan Desa;
- 4) Silaturahmi Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA);
- 5) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019;
- 6) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIM 2019;
- 7) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Satlinmas;
- 8) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 9) Workshop Infografis;
- 10) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM UMKM;
- 11) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM BUMDesa dan BKD;
- 12) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Pasar Rakyat
- 13) Workshop Marketing Online;
- 14) Workshop Start-Up Comunity Sharing;
- 15) Workshop Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Hak Paten dan Merek;
- 16) Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Disversifikasi Pangan;
- 17) Monitoring dan Evaluasi Pembinaan HIPPA/GHIPPA;
- 18) Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Penyediaan Pangan di Tingkat Rumah Tangga;

- 19) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penanganan Tenaga Kerja;
- 20) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kualitas Mutu Pendidikan;
- 21) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 22) Workshop Videografis;
- 23) Workshop Food Fotografi;
- 24) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
- 25) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pembangunan Pariwisata;
- 26) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pengembangan Pemuda;
- 27) Workshop Video Tourism;
- 28) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan Tol Malang-Pandaan;
- 29) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS);
- 30) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Rencana Perubahan Status Jalan di Wilker Bakorwil Malang;
- 31) Monitoring dan Evaluasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 32) Monitoring dan Evaluasi Kerusakan Sumber Air di Wilker Bakorwil Malang;
- 33) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 34) Monitoring dan Evaluasi Kehutanan;
- 35) Monitoring dan Evaluasi Pertambangan;
- 36) Workshop Produk Ramah Lingkungan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban instansi sebagai pelaksana tugas untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi tugas yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas Kinerja tersebut oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang telah diuraikan sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja pada Laporan Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang Tahun 2019 disusun sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, sasaran strategis organisasi yaitu Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang dengan indikator kinerja **“Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti”** dengan target 95%.

Adapun pengukuran capaian kinerja yang dipergunakan sebagai berikut :

Tabel 3.1
SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Pengukuran Kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan apa yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang merupakan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi organisasi dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana yang disajikan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang.

Sasaran : Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang.

Tabel 3.2
PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%

Sebagaimana yang diuraikan pada tabel Pencapaian Kinerja tersebut diatas dan mengacu pada target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2019 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang target 95% realisasi 100% maka capaian kinerjanya 105,26%, dalam kategori **Baik**.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019 merupakan akumulasi dari hasil capaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan yang menghasilkan kinerja perubahan positif organisasi. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang pada Tahun 2019 telah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menghasilkan 36 rekomendasi. Sedangkan rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti sebanyak 36 rekomendasi, sehingga hasil pengukuran kinerja tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3**PENJABARAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019**

URAIAN	JUMLAH	Capaian (%)
Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	36 Rekomendasi	105,26%
Jumlah Seluruh Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	36 Rekomendasi	

Perhitungan :

- Realisasi Kinerja = $(36 / 36) \times 100\% = 100\%$
- Target Kinerja = 95%
- Capaian Kinerja = $(100 / 95) \times 100\% = 105,26\%$

Sebagaimana uraian perbandingan target dan realisasi kinerja tersebut diatas, bahwa dari total rekomendasi hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebanyak 36 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 36 rekomendasi.

Rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah rekomendasi hasil koordinasi yang mendapat disposisi tindaklanjut dari Bapak Gubernur Jawa Timur maupun yang sudah menjadi perhatian pemerintah daerah diwilayah Kabupaten/Kota. Dari 36 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti, Bakorwil Malang menganalisa kembali bahwa ada beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan sesuai dengan arahan rekomendasi dan ada yang belum sesuai dengan arahan rekomendasi. Adapun rekapitulasi rekomendasi selama tahun 2019 sebagaimana diuraikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.4
STATUS PENYELESAIAN TINDAKLANJUT REKOMENDASI TH. 2019

No	Tahun	Jumlah Rekomendasi	Status Penyelesaian Tindakanlanjutan Rekomendasi		
			Selesai		Belum ditindaklanjuti
			sesuai rekomendasi	belum sesuai rekomendasi	
1	2019	36	31	5	-

Rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti sebanyak 36 (tiga puluh enam) rekomendasi meliputi kegiatan yang dapat jelaskan lebih *detail* sebagai berikut :

1. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah



Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 33.145.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	kerjasama antar daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pembangunan berkelanjutan

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diharapkan Bakorwil Malang mengoordinir Pemerintah Kabupaten/Kota Malang Raya agar berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama antar daerah dengan silaturahmi bersinergi mewujudkan Malang Raya Maju Bersama. 2. Selanjutnya, menyusun Kerjasama operasional di Malang Raya terhadap urusan yang akan dikerjasamakan, diantaranya pariwisata, infrastruktur Jalan, Transportasi, kesehatan, lingkungan hidup dan pendidikan. 3. Menugaskan Sekda Kota masing-masing pemerintah daerah untuk mengoordinir urusan-urusan yang dikerjasamakan yang tertuang dalam PKS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ada MOU bertajuk sinergitas Malang Raya Maju Bersama Nomor 050/18/35.73.111/2018; 119/31/35.07.022/2018; dan 050/16/422.012/2018 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Kota /Kab Malang dan Kota Batu. 2. Bakorwil Malang menginisiasi penandatanganan PKS pada 6 (enam) urusan yang akan dikerjasamakan, yaitu pendidikan, kesehatan, pariwisata, lingkungan hidup, BPBD, Perindustrian dan Perdagangan. Serta membahas timelines PKS yang telah disusun oleh masing-masing Sekretaris Daerah.

2. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Persandian



Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 33.145.000,00
Status	Selesai namun belum sesuai Rekomendasi
Diskripsi	Pengamanan persandian ditujukan untuk mengatasi serangan siber terhadap penyelenggaraan e-government yang marak terjadi di pemerintah daerah

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah di wilayah Kerja Bakorwil Malang diharapkan dapat menerapkan Government - Computer Security Incident Respon Team (Gov-CSIRT) yang dimaksudkan untuk melindungi, mengamankan, menanggulangi serta memulihkan informasi penyelenggaraan e-government secara terintegrasi. 2. Pemerintah kabupaten/kota wilayah kerja Bakorwil Malang harus meningkatkan peran persandian dan keamanan informasi sebagai entitas pengaman informasi melalui penyelenggaraan persandian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah di wilayah kerja Bakorwil Malang menuju penerapan Gov-CSIRT. Saat ini pengamanan persandian "Senopati" melalui Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) yang terhubung dengan Badan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 2. Pemerintah Kab. Sidoarjo dan Pemkot Batu telah pengamanan persandian <i>Digital Signature</i> sebagaimana tertuang pada Perbup 52 Tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas Perbup Sidoarjo No 29 Tahun 2010 ttg Tata Naskah Dinas serta Perwali No 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 3. Untuk tahun 2020 Pemerintah Kota Malang akan menerapkan kebijakan <i>Digital Signature</i>.

3. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan Desa;



Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 33.145.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Evaluasi penyelenggaraan Arsip di tingkat pemerintahan desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
Pemerintah daerah di wilayah kerja Bakorwil Malang diharapkan meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan pemerinah desa, keselamatan aset dan perlindungan bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa dalam bentuk fasilitas, pembinaan dan pendampingan teknis kepada aparatur desa.	Terkait permasalahan arsip tanah desa di pemerintah Kabupaten Blitar yang mengalami kerusakan disebabkan banjir maupun gunung meletus, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar telah meretorasi arsip tanah letter C mulai tahun 2019 termasuk memanfaatkan alih media/dokumen digital elektronik.

4. Silaturahmi Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA)



Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 122.082.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Koordinasi sebagai upaya membangun sinergitas FORKOPIMDA dan Pemerintah Kab./Kota di wilayah Bakorwil Malang dalam rangka mendukung Bhakti Satya ke 9 yaitu Jatim Harmonis

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat keamanan TNI - Polri dan Pemerintah Daerah diwilayah kerja Bakorwil Malang diharapkan dapat bersinergi melaksanakan pengamanan pelaksanaan pelantikan Presiden-Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2019 2. Dilakukan kegiatan yang sejenis dalam rangka menjalin hubungan koordinasi yang harmonis guna mendukung program pemerintahan dan pembangunan; 3. Pelaksanaan pengamanan dan kesiapan menghadapi arus lebaran, maka Bakorwil Malang perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan operasi gabungan TNI dan Polri dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berjalan dengan aman diwilayah kerja Bakorwil Malang. 2. Menghadapi arus lebaran 2019, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah siapkan angkutan lebaran gratis, 3. Pertamina telah menyiapkan BBM menjelang dan pasca lebaran serta di ruas jalan tol baru (Tol Pandaan-Malang maupun dari Pandan – Probolinggo), Pertamina telah menyiapkan mobile storage atau mobil tangki yang akan stanby di titik SPBU guna mengantisipasi terhambatnya pengiriman BBM akibat kemacetan; 4. Polda Jatim akan menggelar operasi ketupat selama 12 hari, 10 ribu lebih anggota kepolisian akan dilibatkan dalam pengamanan lebarans serta akan disediakan pos pelayanan dan 225 pos pengamanan selama mudik lebaran.

5. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan


Legislatif 2019



Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 23.730.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilpres 2019 dapat berjalan aman, tertib dan lancar

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan personil petugas trantib/linmas di TPS, dengan jumlah personil sebanyak 2 (dua) kali jumlah TPS pada masing-masing Kabupaten/Kota. 2. Bantuan fasilitas gedung/gudang di Kab/Kota sebagai sarana penyimpanan logistik/kotak suara dan lokasi rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dan 3. memperhatikan adanya WNA yang masuk dalam DPT, agar tidak menjadikan persoalan yang krusial dikemudian hari. 	<p>Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja BAKORWIL III telah menindaklanjuti rekomendasi Bakorwil Malang diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pelaksanaan Pilpres, Legislatif dan DPP Tahun 2019 di Wilayah Kerja Bakorwil Malang telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar. 2. berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Bakorwil Malang ke Kabupaten Blitar, terdapat 1 (satu) orang WNA yang masuk dalam daftar Pemilih pada saat penyelenggaraan pemilihan daerah. Namun telah segera dilaksanakan koordinasi dengan KPU untuk menghapus nama WNA dimaksud.

6. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIM 2019

	<table> <tr> <td>Program</td><td>Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan</td></tr> <tr> <td>Kegiatan</td><td>Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan</td></tr> <tr> <td>Anggaran</td><td>Rp. 23.918.000,00</td></tr> <tr> <td>Status</td><td>Selesai sesuai rekomendasi</td></tr> <tr> <td>Diskripsi</td><td>KIM sebagai Mitra dialog pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah</td></tr> </table>	Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan	Anggaran	Rp. 23.918.000,00	Status	Selesai sesuai rekomendasi	Diskripsi	KIM sebagai Mitra dialog pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah
Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan										
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan										
Anggaran	Rp. 23.918.000,00										
Status	Selesai sesuai rekomendasi										
Diskripsi	KIM sebagai Mitra dialog pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah										
Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti										
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memajukan peran KIM perlu dukungan Anggaran untuk keberlangsungan Kelompok KIM. 2. Perlu legalitas berupa Surat Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang keberadaan KIM. 3. Diperlukannya fasilitasi dan bimbingan teknis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Informasi IT dan Literasi digital untuk mebanu pengembangan informasi kepada KIM Kabupaten/Kota. 	<p>Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja BAKORWIL III telah menindaklanjuti rekomendasi Bakorwil Malang diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ada legalitas KIM yg tertuang pada SK Walikota Malang No 188.45/324/ 35.73.112/2015 tentang _Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat “Lestari” Kel.Tunjung Sekar Kec. Lowokwaru Kota Malang”. 2. SK Walikota Malang Nomor :188.45/186/35.73.112/2014 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat “Tlogomas” Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang. 										

7. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Satlinmas dan Penanggulangan Bencana



Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Cakil dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 22.560.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Sinergitas penanganan dan penanggulangan bencana kekeringan se Wilayah Kerja Bakorwil Malang

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<p>Dalam rangka mitigasi bencana kekeringan yang kerap melanda wilayah Bakorwil Malang diantaranya</p> <ul style="list-style-type: none"> Kab. Pasuruan terdiri dari 7 Kec. dan 21 Desa; Kabupaten Malang terdiri dari 7 Kecamatan dan 9 Desa, Kabupaten Blitar terdiri dari 5 Kecamatan, 17 Desa dan 34 Dusun, Maka Bakorwil Malang bekerjasama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten/Kota dan mitra terkait untuk tetap memantau bencana kekeringan 	<p>Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja BAKORWIL III telah menindaklanjuti rekomendasi Bakorwil Malang diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan monitoring ke dinas PU SDA bahwa kebutuhan air lahan pertanian di wilayah kerja Bakorwil Malang sampai saat ini masih tercukupi oleh Sungai Brantas khususnya melalui Waduk Karangkates dan Waduk Selorejo Dalam rangka mitigasi bencana kekeringan, Bakorwil Malang telah mempersiapkan 1 unit tanki air yang dapat dimanfaatkan pemerintah Kabupaten/Kota;

8. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan



Login

e-Pemutakhiran Data

Silakan Login

NIK

Login

© 2017 Pemerintah Kota Surabaya

Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 33.145.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Sinergitas dalam pelayanan kependudukan yang diarahkan secara aplikasi dalam rangka mempercepat pelayanan kependudukan

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data setiap bulan 2. Segera perlu diadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar Perangkat Daerah Kab/Kota terhadap pemanfaatan dokumen E-KTP 3. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah kabupaten/kota dapat berinovasi dengan menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data kependudukan yang dihimpun dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan kebijakan pemutakhiran data melalui system informasi e-pemutakhiran data yang dilakukan 1 bulan sekali sebagaimana tertuang dalam Perwali Surabaya Nomor 17 Tahun 2019; 2. Pemkot Pasuruan telah menetapkan PKS 3. Perkembangan PKS saat ini hanya Pemkot Pekalongan yang telah menerapkan kebijakan pengelolaan satu data terpadu daerah, sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah. Bakorwil Malang akan menginisiasi penerapan kebijakan satu data terpadu d daerah wilker.

9. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM UMKM



Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 47.025.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Sinergi dalam Pengembangan SDM UMKM sehingga lebih mampu bersaing dalam kompetensi usaha.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<p>Pengembangan SDM UMKM melalui koordinasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal di semua stakeholder yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah sampai akademisi dan pelaku usaha. Universitas Brawijaya Malang melalui program-program kemasyarakatannya bersedia untuk bersinergi dengan OPD teknis di provinsi maupun di kabupaten/kota untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis guna membekali SDM UMKM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusan Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya telah mengadakan Pelatihan "Food Safety Management dan Halal Training 2019 bagi UMKM yang ada di wilayah Kota Malang guna meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM makanan tentang pentingnya menjaga dan mengedalikan bahaya yang mungkin terjadi selama proses produksi makanan. 2. FIA UB memberikan pelatihan manajerial kepada pendamping difabel Rumah Kinasih, Blitar. Pelatihan ini dimaksudkan untuk untuk membantu mengembangkan portal online untuk memudahkan pemasaran produk.

10. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM BUMDesa dan BKD



Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 48.060.000,00
Status	Selesai namun belum sesuai rekomendasi
Diskripsi	Pemantauan peran serta BUMDes memajukan desa dan memberdayakan masyarakat

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. diharapkan disetiap Desa di wilayah Bakorwil Malang akan terbentuk BUMDES. 2. Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini banyak dialokasikan dalam bentuk pembangunan fisik, diharapkan dapat disalurkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai penyertaan investasi Pemerintah Desa kepada BUMDES yang dikelola terpisah dari Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Malang memiliki 370 desa. Sebanyak 113 desa telah mendirikan BUMDes. BUMDes Sumber Sejahtera di Desa Pujon Kidul merupakan yang terbaik dan kerap kali meraih penghargaan di tingkat nasional. 2. di Jawa Timur ada 7.724 desa dan baru 5.400 desa yang memiliki BUMDes. Dari jumlah tersebut, baru 431 BUMDes yang sudah maju dan berkembang.

11. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Pasar Rakyat

Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 43.425.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Pelaksanaan pemantauan Pengembangan potensi SDM Pasar rakyat guna bersaing pada dunia usaha.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar Pemerintah Daerah menindaklanjuti Program Pemerintah Pusat yaitu Revitalisasi Pasar Rakyat untuk memperbaiki sistem manajemen pengelolaan keuangan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dan pedagang pasar. 2. Diharapkan agar setiap Kabupaten/Kota mempunyai minimal 1 (satu) pasar yang berstandar Nasional Indonesia (SNI), serta mempunyai Standar Layanan Mutu Indonesia (SLI). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiga pasar di Kota Malang, Jawa Timur (latim), mendapatkan penghargaan Pasar Tertib Ukur (PTU) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Adalah Pasar Bareng, Pasar Madyopuro, dan Pasar Sawojajar. 2. Komitmen Kota Malang dalam merevitalisasi Pasar sebagai ujung tombak ekonomi masyarakat telah diwujudkan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Pasar yang telah direvitalisasi adalah Pasar Oro-Oro dowo, Pasar Sawojajar, Pasar Bareng

12. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Diversifikasi Pangan

Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 47.755.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Sinergitas peningkatan ketahanan pangan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan pangan melalui pemenuhan gizi keluarga terutama pada anak yang tumbuh kembang, dengan memberikan makanan yang bergizi dengan tepat untuk mengoptimalkan pertumbuhan anak agar tidak stunting (kerdil). 2. Pengupayaan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga melalui Diversifikasi Pangan dengan pemanfaatan potensi lokal yang meningkatkan pendapatan keluarga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali Kota Surabaya telah menandatangani komitmen bersama Percepatan Pencegahan Anak Kerdil di Balai Pemuda pada tanggal 18 Desember 2019 dan pembentukan Satgas Stunting di Kota Surabaya 2. Pemerintah Kab. Malang telah menetapkan Perbup Nomor 33 Tahun 2018 tentang Upaya Pencegahan Stunting 3. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, Pemerintah Kota Malang telah menerapkan kebijakan urbanfarming di masing-masing kelurahan yang telah mendapatkan penghargaan di Apresiasi di Tingkat Nasional atas Program Pengembangan Pertanian Urban Modern di Kota Malang Tahun 2019

13. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan HIPPA/GHIPPA

Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 47.721.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Peran GHIPPA/HIPPA memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan kepada para petani guna memajukan pertanian di Bakorwil Malang.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
Perlu peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi, terutama dalam penguatan kapasitas pengelolaan irigasi, serta penguatan kelembagaannya melalui pembinaan Tim Pembina HIPPA/GHIPPA Kab/Kota.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Blitar di tahun 2019 telah memberikan bakal intensif pembinaan kepada petani kopi dan kakao tentang cara perawatan, pengolahan agar bisa menghasilkan komoditas yang bagus dan memiliki nilai jual tinggi sehingga berdampak pada pendapatan dari petani kopi dan kakao. 2. HIPPA Dewi Ratih nominasi III Provinsi Jawa Timur tahun 2019

14. Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Penyediaan Pangan di Tingkat Rumah Tangga



Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 49.734.000,00
Status	Selesai namun belum sesuai rekomendasi
Diskripsi	Sinergi untuk menyiasati berkurangnya lahan pertanian yang ada dengan pemanfaatan teknologi pertanian

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan sosialisasi budidaya menggunakan teknologi R5 terhadap tanaman yang dikembangkan dalam kelompok rumah pangan lestari; 2. Mempertimbangkan nilai tambah yang besar terhadap hasil program KRPL, maka perlu pemerintah daerah di Wilayah Kerja Bakorwil Malang untuk mendorong implementasi model inovasi teknologi 3. perlu dilakukan pembinaan berwawasan kewirausahaan terhadap KRPL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Sidorarjo menjadi percontohan lahan pertanian yang sukses menggunakan teknologi R5 pada tahun 2019 sehingga diharapkan dapat diterapkan diseluruh Kab/Kota wilayah kerja Bakorwil Malang 2. Pembinaan KRPL telah diterapkan diseluruh pemerintah daerah kabupaten/kota wilayah kerja malang bekerjasama dengan PKK.

15. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penanganan Tenaga Kerja



Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 46.425.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Sinergitas penanganan tenaga kerja Asing di wilayah kerja Bakorwil Malang.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) secara aktif dengan melakukan pertemuan rutin dengan anggota tim Pora tingkat Kecamatan, Kabupaten serta Provinsi guna sharing informasi, update data tenaga kerja asing dan koordinasi pengawasannya, 2. Mengusulkan Bakorwil masuk dalam Tim Pora di wilayah kerjanya untuk meningkatkan pengawasan orang asing serta mengusulkan agar Kantor Imigrasi memberikan informasi secara berkala kepada pihak Kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja tentang keberadaan tenaga kerja asing dengan tembusan ke Bakorwil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Sidoarjo telah menindaklanjuti rekomendasi dengan Rapat penguatan Tim Pora Kab Sidoarjo pada hari Selasa, 20 Maret 2019 di Hotel Luminor Sidoarjo yang dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya yang diikuti oleh 14 instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan 54 instansi kecamatan yang terdiri dari camat, Polsek, dan Koramil.: 2. Rapat pembentukan Tim Pora Kabupaten Sidoarjo tingkat kecamatan pada hari Selasa, 26 September 2019 di Hotel The Sun Sidoarjo yang dihadiri oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin dan Kakanwil Kemnukham Jawa Timur, Susi Sisilawati serta Korpimda Wilayah Sidoarjo. Diharapkan dengan kegiatan tersebut efektivitas dan optimalisasi pengawasan orang asing menjadi meningkat.

16. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kualitas Mutu Pendidikan



Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasayarakatan
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 46.911.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Sinergitas pengelolaan mutu pendidikan diniyah di wilayah kerja Bakorwil Malang.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu disusun payung hukum yang mengatur pendidikan diniyah di kab./kota di Wilker Bakorwil Malang; 2. Peningkatan peran Cabdin melakukan pembinaan pada lembaga pendidikan diniyah, 3. peningkatan SDM melalui silabus pendidikan yang terstruktur, pelatihan, bimtek, dan sertifikasi bagi para pengajar sebagaimana pengajar pendidikan umum, serta monitoring evaluasi dari dinas terkait, 4. meningkatkan kesejahteraan pengajar pendidikan diniyah dan diberikan secara periodik; 5. pengakuan persamaan lulusan pendidikan diniyah dengan pendidikan umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah 2. Regulasi Pendidikan Diniyah trtuang pada Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan bahwa Pendidikan non formal sebagaimana na dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), meliputi Pendidikan Diniyah, Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Agama, Taman Pendidikan Al Quran, Sekolah Minggu serta tambahan penghasilan bagi tenaga pengajar dan sekolah minggu di Kota Malang

17. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan



Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasayarakatan
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 59.874.000,00
Status	Selesai namun belum sesuai rekomendasi
Diskripsi	Sinergi upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Bakorwil Malang.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan proses validasi, Peran Bulog bersifat himbauan dan tidak memaksa sehingga e-Warong dan agen mempunyai alternatif untuk memilih beras yang berkualitas dan tidak mahal. 2. Perlu adanya penambahan e-Warong atau agen yang diusulkan oleh Dinas Sosial Kab/Kota sehingga jarak KPM dan e-Warong tidak terlalu jauh. Dan diharapkan kontribusi dari Pemda untuk mendorong pemasangan repeater internet untuk penguatan signal di daerah terpencil sehingga memudahkan KPM dalam mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 	<p>Rekomendasi telah dikoordinasikan dengan dinas Sosial Provinsi Jawa Timur karena rekomendasi banyak yang harus dikoordinasikan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat karena menyangkut kebijakan nasional, misalnya kebijakan pemakaian beras Bulog.</p>

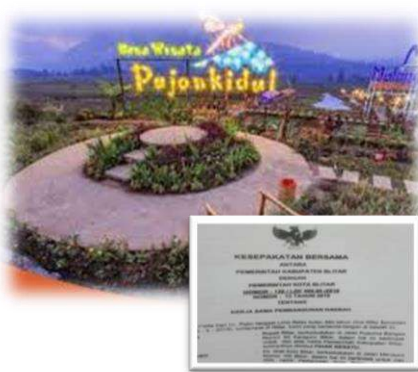
18. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak



Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 46.695.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Senergi kebijakan persamaan gender di wilayah kerja Bakorwil Malang.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan persamaan gender dan sosialisasi faktual dari pihak terkait untuk membela dan mengedepankan hak perempuan, 2. Penguatan analogi untuk meminimalisir penafsiran yang salah masalah dalil agama dan budaya yang dapat menguatkan korban KDRT, 3. membentuk jejaring dengan organisasi masyarakat guna mengadakan kampanye akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4. meningkatkan perhatian Anggaran Responsif Gender (ARG) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah kerja Bakorwil Malang, dan pemberdayaan Forum Anak dan dilibatkan dalam Musrenbang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Peningkatan Anggaran Responsif Gender Di Kota Malang Telah Tertuang Dalam Pasal 11 Huruf d Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah 2. Untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) menggelar Musrenbang Perempuan.

19. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pembangunan Pariwisata



Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 312.896.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Sinergitas Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Bakorwil Malang.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sinergitas bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kab/Kota dengan pelaku industri pariwisata terkait regulasi, yaitu mengikutsertakan pelaku usaha dalam proses pembuatan kebijakan pengembangan dan pelaksanaan pariwisata. 2. Komitmen antar pimpinan daerah untuk memajukan pariwisata di daerahnya 3. menghilangkan ego kedaerahan dalam pengelolaan destinasi wisata irisan dan menggali potensi pariwisata di daerah. 	<p>Telah ada dasar MOU antar daerah sebagaimana yang tertuang pada dokumen Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kab. Blitar dan Kota Blitar Nomor 130/L.20/409.05/2019 dan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah; serta MOU Kota Malang, Kab. Malang dan Kota Batu ttg Kerjasama Pembangunan Daerah diwilayah Malang Raya pada tanggal 27 Agustus 2018 di Kota Malang bertajuk sinergitas Malang Raya Maju Bersama.</p>

20. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pengembangan Pemuda



Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 45.492.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Sinergitas Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Bakorwil Malang.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktifkan pembinaan dan sosialisasi masalah ideologi. 2. Melakukan identifikasi/pemantauan kegiatan di tempat ibadah dan institusi pendidikan tentang masalah radikalisme dan rasisme dengan melibatkan tokoh agama/masyarakat. 3. Memasukkan nilai - nilai kerukunan dan kebangsaan dalam mata pelajaran di institusi pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi untuk menekankan adanya faham radikalisme dan rasisme. 	<p>Pemerintah Kota Blitar telah menindaklanjuti rekomendasi Bakorwil Malang dengan menggelar diskusi “Mengupas Fenomena Intoleransi dan Radikalisme” pada hari Kamis, 24 November 2019 sebagai tindak lanjut rapat koordinasi di Bakorwil Malang untuk mengupas lebih lengkap permasalahan strategi serta pola pencegahan dan penanggulangan intoleransi dan radikalisme. Diikuti sekitar 100 peserta dari elemen tokoh agama, organisasi keagamaan, mahasiswa, akademisi, guru, ASN, jurnalis, takmir mesjid serta pondok pesantren dan dibuka oleh Plt Walikota Blitar, Santoso. KH. Syafrudin dari PWNU Jawa Timur sebagai narasumber memberikan pemahaman masalah radikalisme kepada masyarakat sehingga nantinya secara bersama dapat mencegahnya agar tidak berkembang.</p>

21. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan Tol Malang-Pandaan



Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 36.030.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Inventarisasi permasalahan guna percepatan pembangunan jalan tol Gempol-Pasuruan dan Tol Malang-Pandaan.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bakorwil Malang untuk melaksanakan koordinasi dengan pemda kabupaten/kota membahas proses penyelesaian tukar menukar Tanah Kas Desa yang terkena proyek Tol Malang-Pandaan. 2. Koordinasi Fasilitas Rest Area bagi UMK dan IKM Kabupaten Pasuruan dan kabupaten/kota lain di wilayah kerja Bakorwil III di Malang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Jasa Marga Related Business bersedia memfasilitasi UMK daerah Kab/Kota Pasuruan dan Kab/Kota Malang untuk dapat berpartisipasi / menyewa rest area tersebut. 2. Pemda Pasuruan dan Malang dapat menjalin kerjasama dengan pihak perbankan / pihak lain untuk mensponsori UMK. 3. Pelaksanaan tukar menukar tanah kas Desa (TKD) yang terkena Tol Gempol-Pasuruan dan Tol Malang-Pandaan yang telah diselesaikan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Desa Karangliwon Kec. Grati - Desa Kedawungkulon Kec. Grati - Desa Sidodadi Kec. Lawang - Desa Ranuklingkungan Kec. Grati

22. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)



Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Movev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 35.380.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) baik antar sektor dan antar daerah kabupaten di wilayah BAKORWIL Malang.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan persoalan-persoalan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Lot 9 Balekambang-Kedungsalam serta mensinergikan antara pihak pelaksana jalan Lot 9 dengan pihak Pemerintah Kabupaten Malang . 2. Perlu diinisiasi upaya percepatan penuntasan pembangunan Jalan Lintas Selatan dengan sisa penanganannya di Kabupaten Malang 	<p>Percepatan pelaksanaan pembangunan Jalan Lot 9 Balekambang-Kedungsalam antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap kerusakan akses jalan yang akan dilalui alat berat terkait pembangunan Lot 9 Pansela Balekambang- Kedungsalam, PPK siap mengganti dan atau melakukan perbaikan apabila ada kerusakan akibat alat-alat berat; 2. Sesuai dengan Perpres No. 71 ttg 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pembebasan lahan / tanah di atas 5 Hektare memerlukan Penlok dari Gubernur, yang saat ini Penlok pembangunan Lot 9 Pansela Balekambang- Kedungsalam masih berlaku; 3. Pemkab Malang telah membayar ganti rugi biaya tegakkan penlok, namun demikian belum jelas kepemilikan aset tegakkan penlok yang menjadi otoritas Biro Perencanaan Perhutani;

23. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Rencana Perubahan Status Jalan di Wilker Bakorwil Malang



Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 35.900.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Mengkoordinasikan serta mensinergikan pelaksanaan pengusulan status jalan dan pemanfaatan daerah milik jalan (damija) di wilker Bakorwil Malang.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait Pemerintah Surabaya yang selama ini tidak menyerahkan aset jalan nasional MER ke Pemerintah Pusat c.q. BPJN dengan alasan untuk memelihara taman di sepanjang jalan MERR, maka Pemerintah Pusat disarankan menyerahkan kontruksi jalan tersebut kepada Pemerintah Surabaya, sehingga pemeliharaan jalan maupun taman menjadi kewenangan Pemerintah Surabaya, 2. Penyesuaian kelas dan fungsi jalan di beberapa exit tol. Khususnya exit tol Pakis menjadi Jalan Nasional. 3. Usulan pengalihan status jalan Kabupaten Malang : Kepanjen – Pagak – Sumbermanjing kulon – Donomulyo – Pantai Jonggring Saluko menjadi jalan Provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap fungsi jalan exit Tol Pakis menjadi Jalan Nasional sudah menjadi pembahasan Pihak Pengembang Jalan Tol. Pada tahap ini sedang dilakukan inventarisasi rencana pembebasan lahan di kecamatan madyopuro dan sawojajar yang terkena dampak. 2. Terhadap pengalihan status jalan di Kota Surabaya menunggu klarifikasi Walikota Surabaya.

24. Monitoring dan Evaluasi Perumahan dan Kawasan Permukiman



Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 37.900.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Mengkoordinasikan sinergitas dalam pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman diwilayah kerja Bakorwil Malang baik antar sektor antar daerah kabupaten/kota.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
Perlu sinkronisasi permasalahan sanitasi diwilayah kerja Bakorwil Malang dengan program yang ada di CSR sehingga tercapainya program Gubernur Jawa Timur	Bakorwil menginisiasi dan mengoordinir pelaksanaan CSR di wilayah kerja Bakorwil Malang dan akan dilaksanakan Program Jambanisasi oleh CSR Pt. Greenfield di lokasi Kecamatan Ngajum Kab. Malang dan rencananya peresmian oleh Bu Gubernur Jatim.

25. Monitoring dan Evaluasi Kerusakan Sumber Air di Wilker Bakorwil Malang

Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 30.330.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Mengkoordinasikan permasalahan penyediaan air bersih di Kota Blitar dan Kab. Blitar.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
Memfasilitasi permasalahan Kota Blitar yang saat ini tidak tersedia air dalam atau sumber mata air untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Blitar.	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi kerjasama antara Pemkab dan Pemkot Blitar akan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kota Blitar yg dapat dipenuhi dg Sumber air Dandang, Rambut Monte, Tirtomoyo yang terletak di desa Krisik Kec. Gandusari Kab. Blitar sumber tersebut bagian dari Sungai Brantas yang menjadi kewenangan BBWS Brantas. Pengelolaan dan pengembangan sumber air tersebut akan diupayakan menjadi SPAM Regional. Telah ada dasar MOU antar daerah sebagaimana yang tertuang pada dokumen Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kab. Blitar dan Kota Blitar Nomor 130/L.20/409.05/2019 dan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah. Sehingga dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan sumber air antar kedua belah pihak.

26. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 38.990.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Sinergitas pengelolaan sampah di wilayah kerja Baorwil III Malang.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu kebijakan legalitas bank sampah di daerah 2. Perlu sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing sehingga dapat berdampak positif terhadap pengelolaan sampah 3. TPA Kota Blitar sudah overload. Untuk itu perlu adanya kebijakan pengembangan TPA regional Kota Blitar dan Kab. Blitar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemkot Surabaya telah menetapkan kebijakan Perda Kota Surabaya No 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya pasal 27 tentang Bank Sampah. 2. Proyek Pembangunan TPA Regional Blitar telah tertuang pada Perpres 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Jawa Timur yang akan menampung dan mengelola sampah Kab. Blitar dan Kota Blitar.

27. Monitoring dan Evaluasi Kehutanan

Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 40.080.000,00
Status	Selesai sesuai rekomendasi
Diskripsi	Sinergitas penyelesaian pasca kebakaran hutan di Gunung Arjuno.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait kebakaran hutan di hutan Gn. Arjuno dari 164 Ha,, 70 Ha merupakan kawasan hutan terbakar maka perlu dilakukan antisipasi sebagai berikut: 2. Mewujudkan kesadaran masyarakat (termasuk pelajar, pemdes, masy. Sekitar hutan) akan pentingnya keberadaan hutan. 3. Perlu mengurangi atau meniadakan perilaku atau budaya masyarakat yang potensial menimbulkan kebakaran. 	<p>Telah dilakukan penanganan kebakaran hutan Gunung Arjuno oleh seluruh komponen terkait, antara lain BPBD Provinsi Jatim, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, BPBD Kota Batu, Perhutani, Tahura, Polres Kota Batu, Kodim, dan LMDH.</p>

28. Monitoring dan Evaluasi Pertambangan

Program	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan
Anggaran	Rp. 35.810.000,00
Status	Selesai namun belum sesuai rekomendasi
Diskripsi	Inventarisasi permasalahan pertambangan di wilayah kerja Bakorwil Malang.

Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi permasalahan pertambangan di wilayah bakorwil Malang, antara lain ditengarai adanya aktifitas pertambangan yang membahayakan keselamatan di Ds. Songsong, Malang; Ds. Wonoseno Kab. Pasuruan, Kec. Ampelgading Kab. Malang serta terdapat sejumlah aktivitas tambang yang tidak maksimal reklamasinya. 2. Perlu ada Tim Terpadu memantau aktivitas pertambangan 3. Perlu sosialisasi ijin pertambangan. 4. Menambah jumlah pengawas pertambangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sosialisasi tata cara mengurus ijin pertambangan termasuk penyuluhan hak dan kewajiban dalam pertambangan secara berkala kepada masyarakat umum disekitar lokasi tambang oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini dikarenakan urusan pertambangan salah satu urusan yang terhenti di tingkat Provinsi. 2. Telah ada pergub 49 TAHUN 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Jawa Timur sebagai panduan bagi masyarakat Kab/Kota

29. Pelaksanaan Program EJS di Bakorwil Malang Tahun 2019



Perkembangan startup di Jawa Timur khususnya Malang, Sidoarjo dan Surabaya menjadi peluang besar bisnis untuk bagi kaum milenial. Para milenial kini lebih memilih pekerjaan yang tidak terikat waktu atau kontrak seperti web developer, content creator, ataupun digital marketing. Lewat EJS dan MJC di Bakorwil Malang inilah dapat mempertemukan para

talent yang belum memiliki pengalaman dengan klien dunia usaha. Pada PABD tahun 2019 ini, Bakorwil Malang telah mempersiapkan baik sarana prasarana serta sosialisasi awal guna menjangkau minat kaum milenial di wilayah Bakorwil Malang guna memanfaatkan program tersebut.

Bentuk kegiatan dan sosialisasi awal yang telah dilakukan Bakorwil Malang Tahun 2019 untuk menjangkau potensi dan minat milenial antara lain :

1. Workshop Infografis;
2. Workshop Marketing Online;
3. Workshop Start-Up Community Sharing;
4. Workshop Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Hak Paten dan Merek;
5. Workshop Videografis;
6. Workshop Food Fotografi;
7. Workshop Video Tourism;
8. Workshop Produk Ramah Lingkungan; dan
9. Sosialisasi Millennial Job Center (MJC).



Layanan EJS Bakorwil III Malang

Pemberdayaan Ek. Masy.	<ul style="list-style-type: none"> GRUM/IKM/Startup Layanan SMA/SMK/ST 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Berbasis Kompetensi 2. Pemetaan & Pengawasan 3. Jukdis Peta 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Pelatihan Berbasis Kompetensi 5. Monev Berbasis Kompetensi
Service Point	Perijinan untuk 13 Sektor antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Sektor Scheme Sektor Kikn & Pengawasan Sektor SDA Sektor Perikanan Sektor Perkebunan Sektor Pertambangan 		
Co-Working Space	<ul style="list-style-type: none"> Workin' 40 Sektor (MJC) Startup Network ng. tempat berkolaborasi dan bekerja Facilities pendukung (furniture, listrik, internet, dll) Spesifikasi standar (MJC) Aspek teknis (MJC) Aspek non teknis (MJC) 	Investasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dukungan modal (MJC) 2. Dukungan teknis (MJC) 3. Dukungan pemasaran (MJC) 4. Dukungan legal (MJC) 5. Dukungan lainnya (MJC)

Rencana Layanan di EJS Bakorwil I III Malang yang akan dilaksanakan setelah dilaksanakan Launching pada awal tahun 2020 mendatang sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh para milenial dan masyarakat.

A. *Workshop Infografis*

	Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan
	Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan
	Anggaran	Rp. 118.050.000
	Status	Selesai sesuai rekomendasi
	Kelompok Sasaran	Pengurus dan Anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Pasuruan sebanyak 75 orang Pengurus dan Anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Pasuruan sebanyak 75 orang
Goals	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenalkan dan meningkatkan kompetensi generasi muda dan kelompok KIM tentang tata cara mempromosikan produknya ke dunia usaha 2. Memberikan pelatihan dan pendidikan secara langsung kepada para peserta tentang infografis yaitu suatu bentuk penyajian data dengan konsep visual yang terdiri dari teknis dengan penambahan gambar-gambar ilustrasi yang menarik. 	

B. *Workshop Markeing Online*

	Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi
	Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan
	Anggaran	Rp. 118.050.000
	Status	Selesai sesuai rekomendasi
	Kelompok Sasaran	Pelaku IKM di Kab/Kota Blitar sejumlah 100 Orang
Goals	<p>Untuk memberikan wawasan, pembinaan dan motivasi pelaku usaha IKM sehingga mampu bersaing di pasar global dan internasional dengan tema kegiatan adalah "Marketing Online untuk Bisnis yang Ideal".</p>	

C. *Workshop Start-Up Community Sharing*

	Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi
	Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan
	Anggaran	Rp. 108.050.000
	Status	Selesai sesuai rekomendasi
	Kelompok Sasaran	Pelaku IKM di Kab/Kota se Malang Raya sejumlah 100 Orang
	Goal;	memberikan wawasan, pembinaan dan motivasi pelaku usaha IKM sehingga mampu bersaing di pasar global dan internasional dengan tema kegiatan adalah “ Explorasi Material dan Pengembangan Produk untuk bersaing di pasar global”.

D. *Workshop Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Hak Paten dan Merek*

	Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi
	Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan
	Anggaran	Rp. 128.050.000
	Status	Selesai sesuai rekomendasi
	Kelompok Sasaran	Pelaku IKM di Kab/Kota Pasuruan sejumlah 100 Orang
	Goal;	memberikan wawasan, pembinaan dan motivasi pelaku usaha IKM sehingga mampu bersaing di pasar global dan internasional dengan tema kegiatan adalah “HAKI untuk Usaha berkelanjutan”.

E. *Workshop Videografi*

	Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan
	Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan
	Anggaran	Rp. 118.050.000
	Status	Selesai sesuai rekomendasi
	Kelompok Sasaran	Pelajar SMU/SMK se Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo Karang Taruna Se-Kota Surabaya dan Kab. Sidoarjo Komunitas Pemuda
Goals		mengenalkan dan meningkatkan kompetensi generasi muda cara membuat videografi dan short video secara mandiri sehingga dapat mempromosikan diri dan produknya ke masyarakat/dunia usaha

F. *Workshop Food Fotografi*

	Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan
	Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan
	Anggaran	Rp. 118.050.000
	Status	Selesai sesuai rekomendasi
	Kelompok Sasaran	1. Pelajar SMU dan SMK se Kab/Kota Blitar 2. IKM Makanan dan Minuman se Kab/Kota Blitar 3. Komunitas Pemuda /Karang Taruna se Kab/Kota Blitar
Goals		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenalkan dan meningkatkan kompetensi generasi muda/ industri kreatif mandiri cara membuat food fotografi mandiri hingga dapat mempromosikan produknya ke masyarakat / dunia usaha 2. Memberikan pelatihan dan pendidikan secara langsung pembuatan food fotografi kepada peserta.

C. *Workshop Video Tourism*

	Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan
	Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan
	Anggaran	Rp. 108.500.000
	Status	Selesai sesuai rekomendasi
	Kelompok Sasaran	1. Pengelola Desa Wisata se Malang Raya 2. Karang Taruna Se-Malang Raya 3. Komunitas Peuda Penggiat wisata se Malang Raya
Goals		Untuk mengenalkan dan meningkatkan kompetensi generasi muda penggiat wisata dengan cara membuat vidiografi sendiri agar dapat mempromosikan daerah wisata disekitar lingkungannya

H. *Workshop Produk Ramah Lingkungan*

	Program	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan
	Kegiatan	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan
	Anggaran	Rp. 128.050.000
	Status	Selesai sesuai rekomendasi
	Kelompok Sasaran	Pelaku UKM, pedagang pasar maupun industri rumahan Kab. Sidoarjo sejumlah 94 orang
Goals		1. Untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri khususnya bagi kaum milenial agar menghasilkan produk yang ramah lingkungan serta berdaya saing internasional 2. Mendorong pengembangan usaha, menambah pengetahuan, keterampilan pengelolaan bisnis sehingga diharapkan pelaku usaha UKM dapat mandiri dan berdaya saing

I. Sosialisasi Millenial Job Center (MIC)

	Program	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
	Kegiatan	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
	Anggaran	Rp. 124.000.000
	Status	Selesai sesuai rekomendasi
	Kelompok Sasaran	1. Millenial dari SMK, perwakilan Universitas di Malang Raya, 2. perwakilan dari UMKM dan Komunitas yang ada di Kota Malang (JITC dan MCF) sejumlah 150
Goal:		1. Mengembangkan wawasan dan meningkatkan pemahaman kaum millenial terhadap adanya Millenial Job Center yang akan berada di 5 (lima) Bakorwil Jawa Timur, Khususnya di Bakorwil Malang. 2. Memberikan informasi kaum millenial di wilayah kerja Bakorwil Malang bahwa MIC sebagai wadah pertukaran informasi dan jaringan diantara client mentor dan talenta yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem freelancer yang kompetitif dan kondusif di Jawa Timur. 3. Sosialisasi langsung disampaikan oleh Wakil Gubernur Jatim dan Walikota Malang

A.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.5
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2018	Th. 2019
Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	90%	95%	93,33%	100%

Realisasi Kinerja Tahun 2018 sebesar 93,33% dari target 90% dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019 sebesar 100% dari target 95% yang maka ada kenaikan realisasi kinerja sebesar **6,67%**.

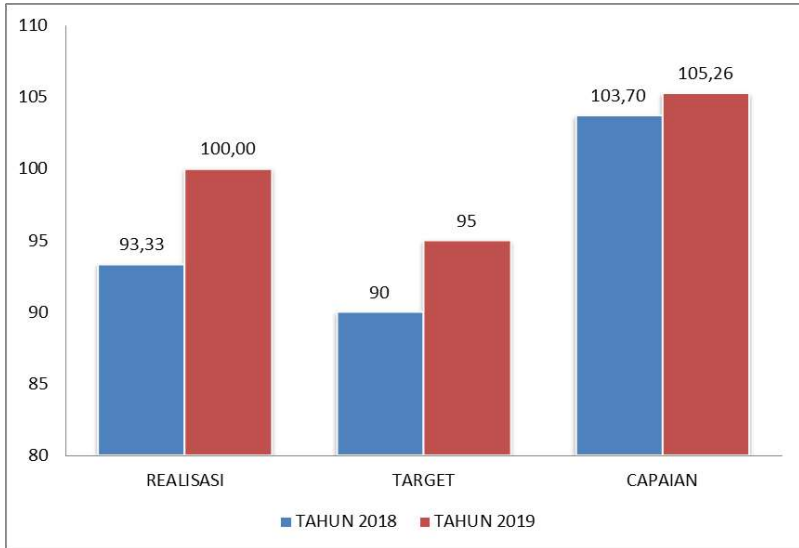
Realisasi Kinerja Tahun 2018 sebesar 93,33% dari target 90% yang berarti capaian kinerja tahun 2018 sebesar **103,70%** dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019 sebesar 100% dari target 95% yang berarti capaian kinerja tahun 2019 sebesar **105,26%** maka ada kenaikan capaian kinerja sebesar **1,56%**.

Tabel 3.6
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Th. 2018	Th. 2019
Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	103,70%	105,26%

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja juga terlihat seperti pada diagram balok berikut :

Diagram 3.1
DIAGRAM PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA



Berdasarkan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas menunjukkan kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang dari tahun 2018 ke tahun 2019 ada kenaikan, hal ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak. Komitmen dan konsistensi yang kuat mulai Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang sampai dengan staf telah bersama-sama berupaya melaksanakan Perjanjian Kinerja sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Perjanjian Kinerja tersebut telah dilaksanakan dengan baik mengacu pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berupa RENSTRA, RENJA atau RKT serta dokumen perencanaan lainnya.

A.3. Perbandingan Realisasi Tahun 2019 dan Target Kinerja Renstra Tahun 2014-2019

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan target RENSTRA Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang Tahun 2014-2019 dapat dijelaskan bahwa tahun 2019 merupakan tahun kelima (terakhir) pelaksanaan Renstra 2014-2019 dengan sasaran Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang. Indikator kinerja yang dipergunakan dalam sasaran tersebut adalah Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 95% sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s/d. AKHIR PERIODE RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (Th. 2019)	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang.	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti.	95%	100%	105,26%

Tabel diatas menguraikan realisasi kinerja tahun 2019 dengan membandingkan target Renstra 2014-2019. Realisasi kinerja pada tahun kelima (terakhir) Renstra yaitu tahun 2019 sebesar 100% dengan target kinerja akhir Renstra Tahun 2014-2019 sebesar 95% maka tingkat kemajuan kinerja sebesar **105,26%**.

A.4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan tercermin dari capaian indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang Tahun 2019 adalah Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti, dengan target 95%. Dari target tersebut realisasi 93,33% dengan capaian kinerja sebesar 103.70%. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan atau sub kegiatan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti baik oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang atau oleh Perangkat Daerah terkait.

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa sasaran strategis Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang adalah “Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang” didukung oleh 5 (lima) program pembangunan yaitu Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan; Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi; Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan; Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana; Program pengembangan Data Informasi.

Program dan kegiatan/sub kegiatan tersebut penjabaran dari pelaksanaan RENSTRA, RENJA atau RKT yang saling terkait dan sinergis serta komitmen dan konsistensi pelaksanaan Perjanjian Kinerja mulai dari pimpinan sampai dengan staf.

Penyebab keberhasilan pelaksanaan program kegiatan antara lain :

- Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan program kegiatan prioritas SKPD.
- Program kegiatan yang dilaksanakan sinergis dengan program kegiatan pemerintah kabupaten/kota atau SKPD kabupaten/kota.
- Sasaran program kegiatan dan indikator kinerja jelas dan terukur.
- Manfaat program kegiatan dapat dirasakan oleh daerah atau SKPD terkait dan masyarakat.

Penyebab kegagalan pelaksanaan program kegiatan antara lain :

- Program kegiatan yang dilaksanakan bukan program kegiatan prioritas kabupaten/kota atau SKPD terkait.
- Program kegiatan yang dilaksanakan tidak sinergis dengan program kegiatan pemerintah kabupaten/kota atau SKPD kabupaten/kota.
- Manfaat program kegiatan tidak dirasakan oleh daerah atau SKPD terkait dan masyarakat.
- Program kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran.

Solusi yang dilakukan antara lain :

- Melakukan evaluasi program kegiatan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sampai dengan selesainya kegiatan.
- Meningkatkan persiapan pelaksanaan program kegiatan (SDM pelaksana program, anggaran, dan waktu yang cukup).
- Meningkatkan sinergitas program kegiatan pemerintah provinsi/Bakorwil Malang dengan kabupaten/kota serta data pendukung yang valid.
- Publikasi kordinasi dan isu strategis aktual yang dikoordinasikan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang.

A5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Cost Per Outcomes)

Keterbatasan anggaran dan kewenangan (Tupoksi Perangkat Daerah) tidak menyurutkan semangat dan capaian kinerja PD. Dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi, kami telah mengoptimalkan potensi yang dimiliki, yaitu :

- Aspek Manajemen : Sebagai antisipasi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah diperlukan kajian akademis untuk menyesuaikan tupoksi PD yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 134 Tahun 2016.
- Aspek Sumber Daya manusia : Keterbatasan jumlah personil dan kualitas SDM yang belum memadai terkadang menjadi kendala. Selama ini mengoptimalkan SDM yang ada dan mengikutkan/mengirim pegawai pelatihan baik formal maupun non formal.
- Jumlah pegawai hanya 46 orang sedangkan sesuai analisis jabatan yang diperlukan di Bakorwil Malang untuk mengisi jabatan fungsional Umum dan jabatan tertentu lainnya diperlukan 76 orang, sehingga masih kurang 30 orang.
- Aspek Sarana dan Prasarana : Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana menyebabkan beberapa tugas kedinasan ada yang belum optimal, sehingga kedepan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana maupun pemeliharannya harus dipenuhi.
- Aspek Program, Kegiatan dan Penganggaran : Untuk mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran PD, Bakorwil Malang hanya didukung oleh 4 program rutin (7 kegiatan) dan 2 program pembangunan (6 kegiatan).

- Perlunya dukungan anggaran yang proporsional untuk melaksanakan program kegiatan baik rutin maupun pembangunan dan tugas-tugas dari Bpk. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Provinsi di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang.

Tabel 3.8
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Rp. 2.745.296.000	26,74%

Sebagaimana yang diuraikan pada tabel diatas bahwa sasaran strategis pada Renstra Bakorwil Malang Tahun 2014-2019 yaitu Meningkatkan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang. Sasaran strategis tersebut didukung oleh 5 (lima) program dengan anggaran sebesar Rp. 2.745.296.000,00 dari total anggaran Belanja Langsung (Ex Rutin dan Pembangunan) sebesar Rp. 10.267.032.000,00 maka anggaran berdasarkan alokasi per sasaran pembangunan tahun 2019 sebesar Rp. 2.745.296.000,00 atau **26,74%**.

Tabel 3.9
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Sasaran 1 Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti Kerja Bakorwil Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%	2.745.296.000	2.632.714.053	95,90%
Program 1.1 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan					521.710.000	486.943.211	93,34%
Program 1.2 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi					692.100.000	654.384.873	94,55%
Program 1.3 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan					949.973.000	927.024.048	97,58%
Program 1.4 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana					477.413.000	460.726.121	96,50%
Program 1.5 Program Pengembangan Data Informasi					104.100.000	103.635.800	99,55%

Pencapaian kinerja dan anggaran sebagaimana pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa seberapa besar Bakorwil Malang dapat merealisasikan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra SKPD, dimana dalam target kinerja tahun 2019 sebesar 95% realisasi 100% yang berarti capaian kinerja Bakorwil Malang tahun 2019 sebesar 105,26%. Sedangkan realisasi anggarannya dari alokasi sebesar Rp. 2.745.296.000,00 realisasi sebesar **Rp. 2.632.714.053,00** atau **95,90%**.

Perbandingan tersebut menunjukkan walaupun realisasi anggaran sebesar 95,90% akan tetapi realisasi target kinerja mencapai 105,26% yang berarti capaian kinerja Bakorwil Malang melebihi realisasi anggaran. Capaian kinerja tersebut ada efisiensi anggaran sebesar 9,36% sebagaimana yang diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 10
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	105,26	95,90	9,36%

A.6. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang tahun 2019 didukung oleh perencanaan program kegiatan yang memadai, mulai dari program jangka menengah (RENSTRA-PD), Rencana Kerja Tahunan (RENJA/RKT) dan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dari pimpinan sampai dengan staf.

Terkait dengan program kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja, dapat dijelaskan bahwa pada masing-masing program kegiatan dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis SKPD dan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Keselarasan sasaran strategis, indikator kinerja dalam RENSTRA, RENJA, RKA/DPA dan Perjanjian Kinerja akan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan program kegiatan, demikian halnya sebaliknya jika ada ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja pada masing-masing dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja akan berdampak pada gagalnya sebuah pelaksanaan program kegiatan karena tidak memiliki acuan dan indikator yang jelas, baik output maupun outcome yang diharapkan.

Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang telah melakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, evaluasi eksternal dan internal terutama evaluasi internal terkait program kegiatan yang sudah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan bersama-sama sesuai bidang masing-masing, sehingga dapat diketahui keberhasilan maupun kegagalan dan solusi yang diperlukan secara obyektif dan transparan. Selain itu keberhasilan pelaksanaan program kegiatan tersebut ditunjang oleh meningkatnya kemampuan dan kualitas SDM yang dimiliki Perangkat Daerah (keikutsertaan diklat struktural dan fungsional), inovasi program kegiatan yang semakin nyata dirasakan manfaatnya oleh daerah atau masyarakat, terintegrasinya perencanaan program kegiatan Perangkat

Daerah dalam mendukung visi misi Gubernur Jawa Timur, pengawasan dan pengendalian program kegiatan yang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan berhasil dilaksanakan dengan baik, sedangkan beberapa kegagalan pelaksanaan program kegiatan lebih pada komitmen Perangkat Daerah terkait dalam menindaklanjuti hasil koordinasi antara lain : Program kegiatan yang dilaksanakan bukan program kegiatan prioritas kabupaten/kota ataupun Perangkat Daerah terkait, Program kegiatan yang dilaksanakan tidak sinergis dengan program kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Perangkat Daerah kabupaten/kota, Manfaat program kegiatan tidak dirasakan oleh daerah atau Perangkat Daerah terkait dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka secara umum pencapaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dimana pada tahun 2019 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan Malang sesuai target RENSTRA dan RENJA sebesar 95% realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 105,26% predikat **baik**.

B. Realisasi Anggaran

Keberhasilan sebuah program dan kegiatan dapat optimal apabila didukung dengan anggaran yang memadai. Alokasi anggaran merupakan komponen penting untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga alokasi anggaran juga berpengaruh pada pencapaian kinerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bakorwil Malang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019.

Adapun alokasi anggaran Bakorwil Malang tahun 2019 dapat diuraikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.11

**PAGU DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
		(Rp)	(%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.313.761.068	8.732.124.786	93,76%
- Belanja Gaji dan Tunjangan	2.674.508.825	2.500.909.238	93,51%
- Tambahan Penghasilan PNS	6.636.642.243	6.231.215.548	93,89%
- Insentif Pemungutan Restribusi	2.610.000	0	-
BELANJA LANGSUNG	10.267.032.000	9.954.026.756	96,95%
- Belanja Pegawai	761.100.000	746.176.500,00	98,04%
- Belanja Barang dan Jasa	6.499.292.000	6.239.559.247,00	96,00%
- Belanja Modal	3.006.640.000	2.968.291.009,00	98,72%
TOTAL BELANJA DAERAH	19.580.793.068	18.686.151.542	95,43%

Tabel 3.12

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
		(Rp.)	(%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.234.407.000	1.194.890.400	96,80
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.234.407.000	1.194.890.400	96,80
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.338.934.000	4.233.014.347	97,56
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3.440.434.000	3.380.072.267	98,25
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	898.500.000	852.942.080	94,93
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1.823.340.000	1.779.500.843	97,60
Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1.184.200.000	1.183.694.881	99,96
Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	639.140.000	595.805.962	93,22
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	125.055.000	113.907.113	91,09
Penyusunan Dokumen Perencanaan	45.500.000	45.348.400	99,67
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	52.200.000	49.447.900	94,73
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	27.355.000	19.110.813	69,86
Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan	521.710.000	486.943.211	93,34
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan	254.087.000	237.412.551	93,44
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan	267.623.000	249.530.660	93,24

Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
		(Rp.)	(%)
Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi	692.100.000	654.384.873	94,55
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan	523.350.000	497.139.174	94,99
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan	168.750.000	157.245.699	93,18
Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan	949.973.000	927.024.048	97,58
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan	412.850.000	395.353.570	95,76
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan	537.123.000	531.670.478	98,98
Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	477.413.000	460.726.121	96,50
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan	175.098.000	167.540.020	95,68
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan	302.315.000	293.186.101	96,98
Program pengembangan Data Informasi	104.100.000	103.635.800	99,55
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	104.100.000	103.635.800	99,55
TOTAL :	10.267.032.000	9.954.026.756	96,95

BAB IV

P E N U T U P

Dalam Laporan Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa keberhasilan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya yang bersungguh-sungguh dan bekerjasama menuju perubahan positif serta didukung oleh perencanaan kinerja yang baik.

Keselarasan dokumen perencanaan yang meliputi perencanaan jangka menengah (RENSTRA-PD), RENJA/RKT, RKA/DPA, komitmen dan konsistensi pelaksanaan Perjanjian Kinerja mulai dari pimpinan sampai dengan staf merupakan faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagaimana yang diharapkan. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil yang mendukung visi misi Provinsi Jawa Timur dan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah (PD). Secara umum program dan kegiatan/sub kegiatan telah diuraikan pada Rencana Kerja dan RKA/DPA PD dengan tolok ukur kinerja yang jelas.

Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian Perangkat Daerah antara lain :

- Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan program kegiatan prioritas PD.
- Program kegiatan yang dilaksanakan sinergis dengan program kegiatan pemerintah kabupaten/kota atau PD kabupaten/kota.
- Sasaran program kegiatan dan indikator kinerja jelas dan terukur.
- Manfaat program kegiatan dapat dirasakan oleh daerah atau PD terkait dan masyarakat.

Pada Tahun 2019 program kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang mencerminkan implementasi dari tugas pokok dan fungsi organisasi yang melekat pada uraian tugas masing-masing bidang dan sekretariat, sehingga sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya dapat tercapai dengan baik. Meningkatnya hasil koordinasi yang ditindaklanjuti oleh PD terkait merupakan capaian kinerja yang menggembirakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Dalam rangka menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang di masa mendatang langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja PD dengan tetap menjaga konsistensi dan atau melakukan perubahan-perubahan kearah yang positif sebagai upaya untuk mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil.
2. Melakukan evaluasi kinerja internal dan pengukuran kinerja setiap tiga bulan sekali sebagai umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja PD terutama yang berkaitan dengan manfaat program kegiatan yang dilaksanakan.
3. Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk memantau pencapaian sasaran secara berjenjang dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Tim SAKIP Provinsi Jawa Timur.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.